

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2021



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)
KABUPATEN LUWU UTARA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 dapat terselesaikan dengan baik.

Tujuan dari Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Utara tahun 2021 adalah untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu serta Tujuan dan Sasaran Program Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.

Perlu disampaikan bahwa Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat keterbatasan waktu, anggaran serta kemampuan yang tersedia. Untuk itu saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan.

Tidak lupa ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan Dokumen Perubahan Renja ini. Akhirnya kami berharap semoga Dokumen Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 ini nantinya dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Utara kedepan.

Masamba, Juli 2021

KEPALA BKPSDM LUWU UTARA



Drs. NURSALIM, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19641127 198602 1 001

DAFTAR ISI**KATA PENGANTAR****DAFTAR ISI****BAB 1. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB 2. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaa Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB 3. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB 4. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**BAB 5. PENUTUP**

- 4.1. Tinjauan Umum
- 4.2. Saran Tindak Lanjut

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.2. Latar Belakang

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi Dokumen Perubahan Renja OPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. Dokumen Perubahan Renja tahun 2021 memuat evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan yang berpedoman pada Rencana Strategis OPD. Dokumen Perubahan Renja tahun 2021 ini pada dasarnya merupakan penjabaran dari Renstra OPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan Dokumen Perubahan Renja dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Penyusunan Dokumen Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Utara tahun 2021 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan Badan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang dijadikan sebagai dasar dalam menyusun Dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 215);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 346);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun

Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 8);

9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 63).

1.3 Maksud, Tujuan, dan Dasar Pertimbangan Perubahan

Adapun maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan sehingga dilakukannya perubahan RENJA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Maksud

Perubahan RENJA Tahun 2021 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Utara dimaksudkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan Organisasi terhadap suatu perubahan atas dokumen perencanaan kegiatan yang bersifat tahunan, yaitu Perubahan Rencana Kerja (RENJA) BKPSDM Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021.

Perubahan RENJA Tahun 2021 memuat dasar pertimbangan perlunya perubahan, hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sampai triwulan kedua, dan perubahan atas program dan kegiatan yang harus dilakukan pada tahapan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021.

2. Tujuan

Perubahan RENJA BKPSDM Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 ditujukan untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam bentuk kebijakan perubahan APBD Tahun 2021. Tujuan penyusunan Perubahan RENJA BKPSDM Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Diperolehnya suatu perubahan rencana kerja tahunan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan yang terjadi di SKPD, dengan melihat sumber daya yang ada.
- b. Diperoleh perubahan atas program dan kegiatan yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan.
- c. Tersedianya acuan penyusunan Perubahan Anggaran BKPSDM Tahun 2021 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara BKPSDM Tahun 2021.

3. Dasar Pertimbangan Perubahan

Perubahan RENJA BKPSDM Kab. Luwu Utara Tahun 2021 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam tahun berjalan (2021) yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Adanya Perkembangan keadaan yang tidak sesuai yang berdampak terhadap pagu sehingga menyebabkan penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan;
- b. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan perubahan pada kelompok sasaran, dan perubahan target kegiatan;
- c. Adanya penempatan belanja yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dalam program dan kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

memuat; latar belakang, landasan hukum, maksud, tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan serta sistematika penulisan.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Menggambarkan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD, serta memuat penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

memuat; telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja, Program dan Kegiatan, Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Memuat; Rencana Kerja Program dan Kegiatan dan Sumber Pendanaan

BAB IV. PENUTUP

memuat; catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD

REKAPITULASI EVALUASI RENJA SKPD 2020 KABUPATEN LUWU UTARA
DENGAN TARGET KINERJA 70 PERSEN (5 dari 5 tahun RENSTRA)

NO	SKPD	CAPAIAN KINERJA OUTCOME & OUT PUT		KRITERIA CAPAIAN KINERJA		JUMLAH DAN PERSENTASE CAPAIAN KEGIATAN						KRITERIA KETEPATAN PERENCANAAN
		2019 (%) (100%)	2016 - 2021 (%) (50%)	2019	2020	JU ML AH PR OG RA M	JUML AH KEGIA TAN	REND AH (%)	SESU AI TARG ET (%)	MELEBI HI TARGET (%)	TDK TERLA KSANA (%)	% YANG MEMENUHI TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	BKPSDM	39,18	80,25	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	10	60	0	44	4	12	
		74,33	94,27	Sedang	Sangat Tinggi			0,00	73,33	6,67	20,00	Sedang

Berdasarkan hasil evaluasi Renja Perubahan BKPSDM Kab. Luwu Utara jumlah kegiatan tahun 2018 jumlah Program dan Kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 10 Program dan 60 kegiatan. adapun tingkat capaian kinerja renja tahun 2019 yang dievaluasi dalam persen (%) adalah untuk kriteria kinerja program (Out Come) sebesar 39,18% dengan kategori ketepatan perencanaan " Sangat Tinggi" dan kinerja kegiatan (Out Put) sebesar 80,25% dengan kategori ketepatan perencanaan "Sangat TINGGI" hal ini disebabkan karena kegiatan pendidikan dan pelatihan yang pelaksanaannya belum menerapkan sistem satu pintu dan keterbatasan anggaran. Untuk penilaian pelaksanaan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran capaian target renja sebesar 100% dan capaian target renstra sebesar 100%
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Capaian target renja 100% dan untuk realisasi capaian target renstra 100%

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur capaian target renja 100%. Sementara untuk capaian renstra sebesar 100%
4. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur realisasi capaian target Renja sebesar 100% sedangkan realisasi capaian target Renstra telah mencapai 100%.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan realisasi capaian target renja 100% dan realisasi capaian target renstra 100%
6. Program Peningkatan pelayanan Kedinasan dengan realisasi Capaian Target Renja 100% sementara realisasi Capaian Target Renstra 100%
7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah realisasi capaian target renja 0% hal ini disebabkan karena pada sejak tahun 2017 BKPSDM Kab. Luwu Utara tidak mengganggu kegiatan Fasilitasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah sementara untuk realisasi capaian target renstra 100%
8. Program pendidikan kedinasan dengan realisasi capaian targetnya Renja sebesar 60% dan realisasi capaian target Renstra sebesar 70%.
9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan capaian target renja 70% sementara realisasi capaian target renstra 80%. Tahun Anggaran 2019 Program ini tidak terlaksana karena adanya keterbatasan Anggaran untuk alokasi penyelenggaraan kediklatan.
10. Program pembinaan dan pengembangan aparatur capaian target Renja sebesar 72.01% dan realisasi capaian target Renstra sebesar 90.39%.

Bobot penilaian kriteria menggunakan penilaian 5 (lima) kategori yang dilakukan bertujuan untuk menentukan kriteria dari capaian masing-masing kegiatan. Adapun kriteria kategori skala peringkat kinerja adalah sebagai berikut :

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Nilai dari hasil perhitungan di setiap indikator program menjadi nilai program. Selanjutnya nilai dari setiap program pada akhirnya juga menjadi nilai dari setiap program kegiatan.

lampiran tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM dan Pencapaian Renstra BKPSDM s/d Juni Tahun 2021
Kabupaten Luwu Utara

Kode Program / Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-3)	Target Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja BKPSDM Tahun 2021) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Catatan	JUMLAH		KETERANGAN			
					Target Renja BKPSDM Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja BKPSDM Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi Tahun 2020 (%) (n-2)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)		PROG RAM	KEGIATAN	JLH KEGIATAN TERLAKSANA BERDASARKAN TARGET RENSTRA			JMLH KEGIATAN TDK TERLAKSANA
														RENDAH	SESUAI/TERCAPAI	MELEBIHI	
1	WAIB																
1	20	KEPEGAWAIAN															
	01	Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kualitas dan kuantitas pelaporan	16,70%			33,73		100,00		1						
	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan renja SKPD yang tersusun	8 dokumen	4	2	2	100,00	2	8	100,00		1		1		
	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LPPD, SAKIP dan PMPRB SKPD yang tersusun	3 dokumen	1	1	1	100,00	1	3	100,00		1		1		
	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis dan Pelatihan	30 orang	10	10	10	100,00	10	30	100,00		1		1		
	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik yang disediakan	3 Jenis	1	1	1	100,00	1	3	100,00		1		1		
	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 Jenis	1	1	1	100,00	1	3	100,00		1		1		
	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Yang Tersedia	6 Jenis	2	2	2	100,00	2	6	100,00		1		1		

Kode Program / Kegiatan	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-3)	Target Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja BKPSDM Tahun 2021) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Catatan	JUMLAH		KETERANGAN			
					Target Renja BKPSDM Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja BKPSDM Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi Tahun 2020 (%) (n-2)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)		PROG RAM	KEGIA TAN	JLH KEGIATAN TERLAKSANA BERDASARKAN TARGET RENSTRA			JMLH KEGIATAN TDK TERLAKSANA
														RENDAH	SESUAI/TERCAPAI	MELEBIHI	
1	2	3	4	5	6	7	8-7/8	9	10/10/9	11	12	13	14	15	16		
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah ASN yang menghadiri Rapat Koordinasi	36 orang	-	16	16	100,00	20	36	100,00		1		1		
	05	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jasa Surat Menyurat yang tersedia	1.000 surat	9.750	5.000	4.500	90,00	1.000	15.250	1525,00		1		1		
	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga non ASN yang mendapatkan jasa	12 orang	4	4	4	100,00	4	12	100,00		1				1
	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Objek Pajak yang dibayarkan	1 aset	1	1	1	100,00	1	3	300,00		1				1
	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	37 jenis	10	10	10	100,00	15	35	94,59		1		1		
	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara Lainnya	1 gedung	1	1	1	100,00	1	3	300,00		1		1		
	02	Program Kepegawalan Daerah	Persentase Distribusi Pelayanan ASN dan Pengembangan Layanan Kepegawalan yang cepat dan terintegrasi	86,96%	-	1	1	0,02			0,02		1				
	03	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Calon ASN yang mengikuti seleksi	6.000 pelamar		1	1	100,00	-	1	0,02		1		1		
	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Berkas ASN Yang Pensiun BUP, Pensiun Dini, Pensiun Janda/Duda dan Pensiun Yatim	116 berkas	-	-	-	-	-	-	0,00		1				1

Kode Program / Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-3)	Target Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja BKPSDM Tahun 2021) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Catatan	JUMLAH		KETERANGAN			
					Target Renja BKPSDM Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja BKPSDM Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi Tahun 2020 (%) (n-2)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)		PROG RAM	KEGIATAN	JLH KEGIATAN TERLAKSANA BERDASARKAN TARGET RENSTRA			JMLH KEGIATAN TDK TERLAKSANA
														RENDAH	SESUAI/TERCAPAI	MELEBIHI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	12	Evaluasi data ,Informasi dan Sistem Informasi Kepegawalan	Jumlah Data ASN yang divalidasi	4.958 data	-	-	-	-	-	0,00		1				1	
	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah ASN yang dikelola Mutasi Masuk, Mutasi Keluar, Mutasi Jabatan, dan Mutasi Antar SKPD	335 orang	40	40	25	62,50	25	90	26,67	1		1			
	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah data ASN yang diverifikasi untuk usul kenaikan pangkat	1.200 berkas	3	1	1	100,00	1	5	0,42	1		1			
	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti seleksi JPTP dan Uji Kesesuaian (JOB FIT)	27 asn	3	1	1	100,00	1	5	18,52	1		1			
	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti Uji Kompetensi (Talent Pool)	40 orang	4	2	2	100,00	2	8	20,00	1		1			
	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang difasilitasi Tugas Belajar dan Ijin Belajar	100 orang	8	8	8	100,00	8	24	24,00	1		1			
	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah OPD yang terpantau dan dibimbing dalam pengisian aplikasi penilaian kinerja aparatur	45 OPD	2	1	1	100,00	1	4	8,89	1		1			
	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diusulkan untuk penghargaan Satyalencana Karya Satya	350 ASN	3	1	1	100,00	1	5	1,43	1		1			
	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Proses Pembinaan	20 kasus	12	12	12	100,00		12	60,00	1		1			

Kode Program / Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-3)	Target Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja BKPSDM Tahun 2021) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Catatan	JUMLAH		KETERANGAN			
					Target Renja BKPSDM Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja BKPSDM Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi Tahun 2020 (%) (n-2)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)		PROG RAM	KEGIATAN	JLH KEGIATAN TERLAKSANA BERDASARKAN TARGET RENSTRA			JMLH KEGIATAN TDK TERLAKSANA
														RENDAH	SESUAI/TERCAPAI	MELEBIHI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	09	Pelayanan Proses Izin Percepatan Pegawai	20 kasus	7	-	-	7,00	-	7	35,00		1		1			
	15	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang terpetakan Kompetensinya sesuai target				#REF!			9,00		1					
	07	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah CASN yang mengikuti Diklat Pelatihan Dasar				150 CASN	-	27	27	100,0		1			1	
	08	Pembinaan, Pengorganisasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembangan dan tenaga pengembang kompetensi pengelolaan sumber belajar, dan kerjasama serta pengembangan kompetensi Pimpinan Daerah, jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah CASN dan ASN yang dipantau setelah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				190 Org	-	-	-	0,00		-				1

Kode Program / Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-3)	Target Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja BKPSDM Tahun 2021) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (n-1)		Catatan	JUMLAH		KETERANGAN			
					Target Renja BKPSDM Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja BKPSDM Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi Tahun 2020 (%) (n-2)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)		PROG RAM	KEGIA TAN	JLH KEGIATAN TERLAKSANA BERDASARKAN TARGET RENSTRA			JMLH KEGIATAN TDK TERLAKSANA
														RENDAH	SESUAI/TERCAPAI	MELEBIHI	
		CAPAIAN KINERJA OUT COME					#REF!	TINGGI		#REF!	SANGAT TINGGI	3	26	0	20	1	5
		CAPAIAN KINERJA OUT PUT					#REF!	Tinggi		#REF!	SANGAT TINGGI			0,00%	76,92%	3,65%	19,23%

Catatan :

- Kegiatan Yang sejalan Reformasi Birokrasi
- Kegiatan Baru
- Kegiatan yang realisasi

	100%	91% - 100%	Sangat Tinggi
		76% - 90%	Tinggi
		66% - 75%	Sedang
		51% - 65%	Rendah
		<= 50%	Sangat Rendah
OUTCOME	40,00%	36,40%	40,00% Sangat Tinggi
		30,40%	36,00% Tinggi
		26,40%	30,00% Sedang
		20,40%	26,00% Rendah
		=<	20,00% Sangat Rendah

Masamba, Maret 2019

KEPALA BADAN,

Drs. NURSALIM, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19641127 198602 1 001

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Hasil analisis capaian kinerja pelayanan BKPSDM berdasarkan indikator kinerja utama sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsi untuk tahun n-2, tahun n-1, tahun n dan tahun n+1 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki 8 Indikator Sasaran terlihat pada lampiran Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Indikator pertama, persentase ASN yang memiliki Sertifikasi keahlian dan jabatan, dengan target 11,09%, pada Tahun 2019 dengan realisasi melebihi target 22,75%, ini disebabkan karena pelaksanaan diklat dan pelatihan semuanya menjadi satu pintu dibawah kendali BKPSDM namun demikian anggaran dari kegiatan tetap pada SKPD masing-masing.
2. Indikator kedua, persentase ASN yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan target 88,71% dan realisasi capaian 80,68%, Ini belum mencapai target karena belum dilakukan perhitungan indeks profesionalitas yang sesuai dengan tugas dan fungsi masing - masing SKPD, sejak tahun 2018 akan dilakukan perhitungan dan penilaian indeks profesionalitas ASN sesuai kompetensi, kompensasi , kinerja dan disiplin dalam pengembangan profesionalitas ASN dimasa akan datang.
3. Indikator ketiga, rata-rata tingkat kehadiran PNS dalam 1 tahun, target 98,94% dengan realisasi capaian 99% Tingkat kehadiran PNS melewati target, ini disebabkan dengan diberlakukannya finger print untuk pemberian tunjangan tambahan penghasilan (TPP).
4. Indikator keempat, persentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin, target 1,66%, tahun 2018 terdapat 13 kasus ASN yang mendapatkan hukuman disiplin atau realisasi sebesar 0,26%, pada Tahun 2019 mengalami penurunan dimana ASN yang mendapatkan hukuman disiplin terdapat 11 kasus atau realisasi sebesar 0,22%, ini diakibatkan pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan pelanggaran PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS ,PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS , UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , UU No 20 Tahun 2001 tentang Korupsi yang kebanyakan di dominasi oleh tindak pidana korupsi dan narkotika, dan akan terus di adakan evaluasi melalui sosialisasi dan

monev ASN yang diharapkan dapat menekan pelanggaran-pelanggaran disiplin ASN.

5. Indikator kelima, rasio ASN terhadap jumlah penduduk, dengan target 1,66% dan realisasi target 1,51% , tidak tercapainya target disebabkan oleh keterbatasan kuota penerimaan CPNS pada tahun 2018 di kabupaten Luwu Utara.
6. Indikator keenam, persentase data ASN yang telah dimuktahirkan dengan sistem yang tersedia, dengan target 59.71% dan realisasi sebesar 80.68%, sudah melampaui target disebabkan oleh sistem aplikasi jaringan yang sudah memadai dan sambungan internet yang lancar dengan adanya penabahan kapasitas dalam meningkatkan capaian realisasi kinerja.
7. Indikator ketujuh, status laporan kinerja kategori baik dengan target predikat B dan realisasi predikat B dari hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kab. Luwu Utara.
8. Indikator kedelapan, laporan keuangan kategori BPK RI dengan target WTP dan realisasi predikat WTP untuk Kabupaten Luwu Utara hasil evaluasi Tahun Anggaran 2018 .

Lampiran tabel 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Tabel 2.2
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 KABUPATEN LUWU UTARA**

NO	INDIKATOR	Satuan	TARGET RENSTRA				REALISASI CAPAIAN				PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
			TAHUN 2018 (n-3)	TAHUN 2019 (n-2)	TAHUN 2020 (n-1)	TAHUN 2021 (n)	TAHUN 2018 (n-3)	TAHUN 2019 (n-2)	TAHUN 2020 (n-1)	TAHUN 2021 (n)	TAHUN 2020 (n-1)	TAHUN 2021 (n)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	
1	Persentase ASN yang memiliki Sertifikasi keahlian dan jabatan	Persen	10,24%	11,09%	11,94%	12,79%	19,32%	22,75%			11,94%	12,79%	
2	Persentase ASN yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya	Persen	85,30%	88,71%	93,82%	95,53%	79,43%	80,68%			93,82%	95,53%	
3	Rata-rata tingkat kehadiran PNS dalam 1 tahun	Persen	98,43%	98,60%	98,94%	98,94%	99,29%	99,00%			98,94%	98,94%	
4	Persentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin	Persen	0,10%	7,00%	0,03%	0,02%	0,26%	0,22%			0,03%	0,02%	
5	Rasio ASN terhadap jumlah penduduk	Persen	1,60%	1,66%	1,67%	1,68%	1,54%	1,51%			1,67%	1,68%	
6	Persentase Data ASN yang telah dimuktahirkan dengan sistem yang tersedia	Persen	51,18%	59,71%	76,77%	97,24%	49,64%	80,68%			76,77%	97,24%	
7	Status laporan kinerja kategori baik	A, B, C, D	B	B	B	BB	B	B			B	BB	
8	Laporan keuangan kategori BPK RI	WTP/WDP/DI SCLAIMER	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP			WTP	WTP	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM

Melihat permasalahan dan isu yang berkembang terhadap pelayanan di BKPSDM Kabupaten Luwu Utara, sehingga perlu menetapkan dan menentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil ditengarai masih tidak kompeten (*incompetence*) dalam menangani tugas dan fungsi di bidangnya khususnya pelayanan publik;
2. PNS tidak terdistribusi berdasarkan kompetensi, keahlian dengan bidang tugas masing-masing (distribusi dan alokasi);
3. PNS yang ada tidak berkualifikasi sesuai dengan kebutuhan tugas-fungsi jabatan yang diduduki (*mismatch*);
4. PNS yang ada tidak terdayagunakan secara optimal (*under employment*);
5. kinerja rendah (*under performance*).
6. pembinaan dan pengembangan karier jabatan PNS belum didasarkan pada standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dan Pola Karier PNS yang jelas;
7. Evaluasi Kinerja PNS belum berdasarkan pada Sistem Penilaian Kinerja berbasis merit, yang memungkinkan capaian kinerja individu pegawai dapat mendorong peningkatan karirnya dan memungkinkan pemberian kompensasi dapat dilakukan secara adil berdasarkan prestasi pegawai sesuai dengan bobot jabatannya dan beban kerja (Sistem Renumerasi Berbasis Kinerja), serta belum diterapkannya sistem reward and punishment;
8. belum terbangunnya Sistem Perencanaan dan Rekrutmen PNS berdasarkan kebutuhan formasi jabatan dan standar kompetensinya, mengakibatkan distribusi dan alokasi pegawai tidak merata;
9. Dalam rangka perumusan kebijakan dan penyelenggaraan manajemen kepegawaian belum sepenuhnya didukung data dan informasi (database) kepegawaian yang memadai hal ini karena tidak sinkronnya SIMPEG BKPSDM dengan SIMPEG di SKPD Kab. Luwu Utara
10. Kondisi kepegawaian yang ada masih diwarnai ketidak konsistennya penyelenggaraan manajemen PNS terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada prinsipnya tidak jauh berbeda, sebagaimana terlihat pada lampiran dalam Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan para pemangku kepentingan hasil Musrenbang dari SKPD yang terkait langsung dengan pelayanan yang ditujukan kepada BKPSDM terdapat 2 (dua) kegiatan yang diusulkan yaitu Kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS dan Penempatan PNS, dengan rincian dapat dilihat pada lampiran tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2021.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan tahun 2021
Kabupaten Luwu Utara

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kod # Pro	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
01	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang efektif	100 %	1.871.130.299	Program pelayanan administrasi perkantoran		Persentase peningkatan layanan administrasi perkantoran	100 %	3.889.153.423	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Renstra dan renja SKPD yang tersusun	8 Dokumen	41.176.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Renstra dan renja SKPD yang tersusun	8 Dokumen	72.959.240	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah dokumen LPPD, SAKIP dan PMPRB SKPD yang tersusun	3 Dokumen	24.902.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja		Jumlah dokumen LPPD, SAKIP dan PMPRB SKPD yang tersusun	3 Dokumen	37.706.345	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	36 ASN	3.260.919.399	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	36 ASN	3.224.595.150	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis dan Pelatihan	30 ASN	10.839.400	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis dan Pelatihan	30 ASN	80.232.800	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Logistik Yang disediakan	3 Jenis	36.410.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Logistik Yang disediakan	3 Jenis	65.384.688	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 Jenis	15.590.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 Jenis	28.980.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Bahan Bacaan Yang Tersedia	6 jenis	12.720.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Bahan Bacaan Yang Tersedia	6 jenis	13.110.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah ASN yang menghadiri Rapat Koordinasi	36 ASN	164.882.100	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah ASN yang menghadiri Rapat Koordinasi	36 ASN	178.256.900	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Jasa Surat Menyurat yang tersedia	1.000 Pacuk	500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Jasa Surat Menyurat yang tersedia	1.000 Pacuk	1.150.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah tenaga non ASN yang mendapatkan jasa	12 orang	97.600.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah tenaga non ASN yang mendapatkan jasa	12 orang	146.050.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Objek Pajak yang dibayarkan	1 Aset	500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Objek Pajak yang dibayarkan	1 Aset	1.725.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	37 jenis	4.140.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	37 jenis	17.307.500	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	1 Gedung Kantor	850.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	1 Gedung Kantor	2.304.600	

Kode Pro	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Profesional	100 %	1.333.055.500	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Profesional	100 %	1.755.489.720			
	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK		Jumlah Calon ASN yang mengikuti seleksi	6.000 Pelamar	526.000.000	Pengadaan mesin / kartu absensi		Persentase kehadiran ASN	unit	718.652.940			
	Koordinasi Pelaksanaan Administratif Pemberhentian		Jumlah Berkas ASN Yang Pensiun BUP, Pensiun Dini, Pensiun Janda/Duda dan Pensiun Yatim	116 berkas	26.867.300	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Jumlah Berkas ASN Yang Pensiun BUP, Pensiun Dini, Pensiun Janda/Duda dan Pensiun Yatim	116 berkas	54.405.350			
	Evaluasi data ,Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Data ASN yang divalidasi	4.958 Data	31.995.500	Evaluasi data ,informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Data ASN yang divalidasi	4.958 Data	69.599.725			
	Pengelolaan Mutasi ASN		Jumlah ASN yang dikelola Mutasi Masuk, Mutasi Keluar, Mutasi Jabatan, dan Mutasi Antar SKPD	335 orang	15.882.800	Pengelolaan Mutasi ASN		Jumlah ASN yang dikelola Mutasi Masuk, Mutasi Keluar, Mutasi Jabatan, dan Mutasi Antar SKPD	335 orang	41.991.100			
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Jumlah data ASN yang diverifikasi untuk usul kenaikan pangkat	1.200 berkas	83.512.200	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Jumlah data ASN yang diverifikasi untuk usul kenaikan pangkat	1.200 berkas	119.399.900			
	Pengelolaan Promosi ASN		Jumlah ASN yang mengikuti seleksi (PTP dan Uji Kesesuaian (JOB FIT)	27 ASN	461.771.000	Pengelolaan Promosi ASN		Jumlah ASN yang mengikuti seleksi (PTP dan Uji Kesesuaian (JOB FIT)	27 ASN	352.504.900			
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN		Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti Uji Kompetensi (Talent Pool)	40 orang	18.900.000	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN		Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti Uji Kompetensi (Talent Pool)	40 orang	26.146.400			
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		Jumlah ASN yang difasilitasi Tugas Belajar dan Ijin Belajar	100 orang	108.110.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		Jumlah ASN yang difasilitasi Tugas Belajar dan Ijin Belajar	100 orang	127.446.450			
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah OPD yang terpantau dan dibimbing dalam pengisian aplikasi penilaian kinerja aparatur	45 OPD	23.283.800	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah OPD yang terpantau dan dibimbing dalam pengisian aplikasi penilaian kinerja aparatur	45 OPD	107.632.525			
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai		Jumlah ASN yang diusulkan untuk penghargaan Satyalencana Karya Satya	350 ASN	3.712.000	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai		Jumlah ASN yang diusulkan untuk penghargaan Satyalencana Karya Satya	350 ASN	48.524.875			
	Pembinaan Disiplin ASN		Jumlah ASN yang Proses Pembinaan	20 Kasus	15.011.000	Pembinaan Disiplin ASN		Jumlah ASN yang Proses Pembinaan	20 Kasus	47.568.600			
	Pelayanan Proses Ijin Perceraian Pegawai		Jumlah Ijin Perceraian yang diproses	20 Kasus	17.709.900	Pelayanan Proses Ijin Perceraian Pegawai		Jumlah Ijin Perceraian yang diproses	20 Kasus	43.516.955			
03	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR		Persentase ASN yang terpetakan Kompetensinya sesuai target	100 %	1.177.307.000	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR		Persentase ASN yang terpetakan Kompetensinya sesuai target	100 %	1.666.989.458			

Kode Pro	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah CASN yang mengikuti Diklat Pelatihan Dasar	150 CASN	3.377.507.000	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah CASN yang mengikuti Diklat Pelatihan Dasar	150 CASN	1.613.792.758	
	Pembinaan, Pengorganisasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembangan dan tenaga pengembang kompetensi pengelolaan sumber belajar, dan kerjasama serta pengembangan kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan		Jumlah CASN dan ASN yang dipantau setelah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	190 orang	-	Pembinaan, Pengorganisasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembangan dan tenaga pengembang kompetensi pengelolaan sumber belajar, dan kerjasama serta pengembangan kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan		Jumlah CASN dan ASN yang dipantau setelah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	190 orang	53.196.700	
					6.381.692.799			JUNJAH		7.292.332.601	

M/S/MS/MS, 10/1/2021
KEPALA BADAN

Drs. NURSAJIM, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19641127 198602 1 001
Nip : 19641127 198602 1 001

Tabel 2.5

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2021

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN /VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
1	Seleksi Penerimaan CPNS	Kecamatan Limbong, Seko, Rampi, Malangke , Malangke Barat dan Kec. Sabbang Selatan dan Baebunta Selatan	Jumlah CPNSD yang memiliki kualifikasi sesuai dengan formasi yang dipersyaratkan		Pengadaan Pegawai
2	Penempatan PNS	Kecamatan Limbong, Seko, Rampi, Malangke , Malangke Barat dan Kec. Sabbang Selatan dan Baebunta Selatan	Jumlah ASN yang ditempatkan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya		Kekurangan tenaga medis dan tenaga guru

BAB III**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN****3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Dokumen Renja BKPSDM adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, dan bersumber dari dokumen Renstra BKPSDM periode 2016-2021. Renstra bersumber dari dokumen RPJMD Kabupaten Luwu Utara periode 2016-2021. Sedangkan RPJMD Kabupaten bersumber juga dari RPJMD Propinsi yang tentu saja inspirasi dan sumbernya adalah RPJP Nasional dan RPJM Nasional. Dari RPJM Nasional melahirkan Renstra Kementerian. Renstra Kementerian yang relevan dan searah dengan Renstra BKPSDM Kabupaten Luwu Utara adalah Renstra Kementerian PAN-RB dan BKN Pusat yang juga merupakan kunci kesuksesan Program Nawacita yang terletak pada birokrasi yaitu Sumber Daya Aparatur Pemerintahan.

Untuk itu ditampilkan Program Nawacita, Visi dan Misi Kementerian PAN-RB dan BKN Pusat sebagai berikut:

I. Program Nawacita

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas-aktif.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui program Indonesia Pintar dengan wajib belajar 12 tahun bebas pungutan. Dan program Indonesia Sehat untuk peningkatan layanan kesehatan masyarakat. Serta Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera dengan mendorong program kepemilikan tanah seluas sembilan juta hektar.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi dan domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui penataan kembali kurikulum pendidikan nasional.
9. Memperteguh Keb-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui penguatan kebhinekaan dan menciptakan ruang dialog antar warga.

II. Kementerian PAN-RB

Visi: "Terwujudnya aparatur negara yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi menuju pemerintahan yang Baik".

Misi :

- 1). Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- 2). Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur;
- 3). Meningkatkan koordinasi pengawasan;
- 4). Terwujudnya kelembagaan yang efektif dan efisien;
- 5). Meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan;
- 6). Meningkatkan profesionalitas SDM aparatur.

III. BKN Pusat

VISI: "*Pegawai Negeri Sipil yang Profesional, Netral, dan Sejahtera*". MISI:

- 1). Mengembangkan Sistem Manajemen SDM PNS
- 2). Merumuskan kebijakan pembinaan PNS dan menyusun peraturan perundang-undangan kepegawaian.
- 3). Menyelenggarakan pelayanan prima bidang kepegawaian
- 4). Mengembangkan sistem informasi manajemen kepegawaian.
5. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian kepegawaian
- 6). Menyelenggarakan manajemen internal BKN.

Dari visi dan misi dua kementerian tersebut BKPSDM juga memperhatikan Visi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara yaitu "**Luwu Utara Yang Religius dengan Pembangunan Berkualitas dan Merata Yang Berlandaskan Kearifan Lokal pada 2021**".

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati, tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Utara, maka misi yang sesuai dengan misi bupati adalah Misi Kesatu yang berbunyi :

“Mewujudkan masyarakat yang religius, tatakelola pemerintahan yang baik, dan komunitas adat yang berdaya”

dengan tujuan sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatkan penerapan sistem dan proses tatakelola yang konsisten dengan prinsip – prinsip pemerintahan yang baik dengan sasaran :

(1) Terimplementasikannya prinsip – prinsip akuntabilitas, transparansi, efektif-efisien, dan patuh pada supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tujuan 2 : Meningkatkan pengamalan agama dan peran agama dalam penyelenggaraan pembangunan dengan sasaran:

(1) Terimplementasikannya nilai – nilai dan prinsip-prinsip kehidupan yang religius dalam masyarakat.

Tujuan 3 : Meningkatkan partisipasi dan peran lembaga / komunitas adat dalam pembangunan dengan sasaran:

(1) Terpenuhinya rekognisi dan keberdayaan lembaga / komunitas adat dalam berperanserta dalam penyelenggaraan pembangunan.

Adapun keterkaitan antara misi, kebijakan daerah dengan kebijakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Utara yaitu :

Misi 1	:	Mewujudkan masyarakat yang religius, tata kelola pemerintahan yang baik, dan komunitas adat yang berdaya.
Tujuan	:	Meningkatkan penerapan sistem dan proses tata kelola yang konsisten dengan prinsip – prinsip pemerintahan yang baik
Sasaran	:	Terimplementasikannya prinsip – prinsip akuntabilitas, transparansi, efektif-efisien, dan patuh pada supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Strategi : Meningkatkan peran lembaga-lembaga sosial keagamaan dalam pengamalan nilai-nilai religius, pemenuhan sarana/prasarana ibadah dan kerukunan antar umat beragama

Sasaran dan Strategis BKPSDM dalam menunjang visi dan misi kesatu kepala daerah :

Sasaran : 1. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur berbasis kompetensi.
2. Menguatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen.
3. Meningkatnya Disiplin aparatur dan kesejahteraan pegawai
4. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian berbasis TIK.

Strategi : 1. Meningkatkan profesionalisme pegawai dengan dana yang memadai;
2. Pegawai yang professional dengan renumerasi dan tingkat kesejahteraan yang adil, layak dan kompetitif;
3. Tingkatkan kinerja aparatur yang bebas KKN
4. Penerapan Simpeg dengan memanfaatkan TI untuk tingkatkan kinerja aparatur.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

a. Tujuan :

- 1) Meningkatkan Kapasitas ASN dan Kapasitas Manajemen ASN untuk mendorong Profesionalisme, Kompetensi dan Kinerja Sumberdaya Aparatur.
- 2) Mewujudkan Tata kelola ASN dan menguatnya kapasitas kelembagaan Meningkatkan pengelolaan administrasi kepegawaian.

b. Sasaran :

- 1) Meningkatnya Kompetensi ASN
- 2) Terwujudnya Tata kelola ASN dan menguatnya kapasitas kelembagaan Meningkatkan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- 3) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian berbasis TIK.
- 4) Terwujudnya pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif

Tujuan dan Sasaran secara rinci dapat dilihat dalam lampiran tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran

Tabel 3.2
TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM KABUPATEN LUWU UTARA

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN	
				2020	2021
1	Meningkatkan Kapasitas ASN dan Kapasitas Manajemen ASN untuk mendorong Profesionalisme, Kompetensi dan Kinerja Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya Kompetensi ASN	Persentase ASN yang memiliki Serifikasi keahlian dan jabatan	11,94%	12,79%
2	Mewujudkan Tata kelola ASN dan menguatnya kapasitas kelembagaan	Terwujudnya Tata kelola ASN dan menguatnya kapasitas kelembagaan		93,82%	95,53%
			Rata-rata tingkat kehadiran PNS dalam 1 tahun	98,94%	98,94%
			Persentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin	0,03%	0,02%
			Rasio ASN terhadap jumlah penduduk	1,67%	1,68%
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian berbasis TIK.	Persentase Data ASN yang telah dimuktahirkan dengan sistem yang tersedia	76,77%	97,24%
		Terwujudnya pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif	Status laporan kinerja kategori baik	BB	BB
			Laporan keuangan kategori BPK RI	WTP	WTP

3.3 Program dan Kegiatan

- a. Faktor-Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Salah satu faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah pencapaian visi dan misi kepala daerah. sesuai dengan Visi kesatu Kabupaten Luwu Utara maka Faktor yang menjadi bahan pertimbangan adalah Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Aparatur yang berbasis kompetensi. adapun program dan kegiatan yang terkait dengan faktor tersebut adalah Kegiatan Pendidikan dan Penjurangan Struktural dimana sasaran kegiatan tersebut adalah pejabat struktural pemerintah kabupaten luwu utara.

- b. Uraian garis besar rekapitulasi Program dan Kegiatan

✓ Jumlah Program dan Kegiatan Prioritas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 ditetapkan 3 Program dan 10 Kegiatan dan 47 Sub Kegiatan indikatif dalam rangka penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang pendayagunaan aparatur sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah

1.1 Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah

- 1) Penyusunan renstra dan renja perangkat daerah
- 2) Penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan
- 3) Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah

1.2. Administrasi keuangan

- 1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- 2) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- 3) Penyusunan laporan keuangan bulanan/semesteran

1.3. Administrasi umum

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat
- 2) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- 3) Penyediaan jasa administrasi keuangan
- 4) Penyediaan jasa kebersihan kantor
- 5) Penyediaan alat tulis kantor
- 6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 7) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 8) Penyediaan makanan dan minuman
- 9) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- 10) Pengadaan peralatan gedung kantor
- 11) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- 12) Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor

1.4. Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur

- 1) Sosialisasi peraturan perundang-undangan
- 2) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

2. Program kepegawaian daerah**2.1. pengelolaan data dan informasi ASN**

- 1) Pengembangan sistem informasi manajemen ASN dan manajemen naskah dan dokumen ASN
- 2) Pengelolaan sistem informasi kepegawaian
- 3) Pengelolaan data kepegawaian

2.2. Adminstrasi kepegawaiaan

- 1) Penyusun analisis kebutuhan, formasi dan pelaksanaan pengadaan ASN
- 2) Penataan dan mutasi jabatan
- 3) Penyelesaian penempatan, pengangkatan, mutasi dan kepangkatan
- 4) Penyelesaian pemberhentian dan pemberian pensiun
- 5) Pelaksanaan proses pemberhentian pegawai
- 6) Fasilitas pengadaan dan pemberhentian
- 7) Pengelolaan mutasi ASN

- 8) Pengelolaan penempatan dalam jabatan ASN
- 9) Pembuatan daftar penjagaan kenaikan pangkat
- 10) Pengelolaan kenaikan pangkat ASN

2.3. Peningkatan kapasitas ASN

- 1) Peningkatan kapasitas ASN
- 2) Pengembangan penilaian kinerja ASN
- 3) Pengembangan assessment center
- 4) Fasilitas kelembagaan profesi ASN (korpri dan lembaga profesi ASN)
- 5) Fasilitas profesi ASN
- 6) Pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN
- 7) Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN
- 8) Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat
- 9) Pengelolaan karier dalam jabatan fungsional

2.4. Pengembangan karier ASN

- 1) Pengembangan karier dan promosi ASN
- 2) Penyusunan pedoman pola pengembangan karier

2.5. Pembinaan ASN

- 1) Pembinaan disiplin ASN
- 2) Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN
- 3) Penegakan disiplin, pemberian penghargaan dan pendidikan dan pelatihan

3. Program pengembangan sumber daya manusia

3.1. pengembangan kompetensi teknis

- 1) penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintah komkuren, perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintah umum
- 2) penyusunan standar perangkaat pembelajaran pemerintahan dalam negeri kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi

- penyelenggaraan urusan pemerintah konkuren, perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintah umum
- 3) penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum
 - 4) pembinaan, pengorganisasian, fasilitas, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggaraan konkuren, perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum
- ✓ Lokasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2021 difokuskan pada 2 Lokasi yaitu Kabupaten Luwu Utara dan Kota Makassar. Karena terdapat beberapa kegiatan yang teknis pelaksanaannya di Propinsi Sulawesi Selatan
 - ✓ Total dana/pagu Indikatif yang dibutuhkan untuk membiayai program dan kegiatan tersebut secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.3 sebagai berikut :

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktifitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (Output) dalam rangka mencapai hasil (Outcome) suatu program.

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 berisi program dan kegiatan untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah.

Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan Kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Sumber Dana yang dibutuhkan untuk mendanai pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2021.

BAB V PENUTUP

5.1. Tinjauan Umum

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Utara tahun 2021 ini merupakan Dokumen Perubahan Rencana Kerja tahunan yang disusun berdasarkan Renstra OPD 2016-2021 dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Rencana Kerja ini juga memuat tujuan dan sasaran, target indikator kinerja, program/kegiatan serta pagu indikatif yang nantinya menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021.

5.2. Saran Tindak Lanjut

Kami menyadari bahwa penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021. ini masih jauh dari kesempurnaan dan tidak terlepas dari kekurangan, oleh karena itu kami mohon saran dan masukan dari berbagai pihak terutama yang terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Luwu Utara dan melalui kesempatan ini kami menyampaikan terimakasih dan penghargaan atas saran serta bantuan yang diberikan.

Masamba, Juli 2021

Kepala BKPSDM Kab. Luwu Utara



Drs. NURSALIM, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19641127 198602 1 001